CASCADING/POHON KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2030

VISI :
SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

MENDUKUNG MISI 2 :	MENDUKUNG MISI 3 :	MENDUKUNG MISI 6 :
Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan	Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, Menuju pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN UTAMA PEMDA

TUJUAN UTAMA PEMDA
TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
Indikator : Pertumbuhan Ekonomi (%); PDRB per Kapita (Rp); Kontribusi PDRB Provinsi (%); Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%); Indeks Entropi Theil; Indeks Daya Saing

TUJUAN UTAMA PEMDA
MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati

TUJUAN UTAMA PEMDA
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS PEMDA

SASARAN STRATEGIS PEMDA
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH
Indikator : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%); Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%); Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (%)

SASARAN STRATEGIS PEMDA
MENINGKATNYA UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Indikator : Persentase Penurunan Emisi GRK (%) kumulatif; Persentase Penurunan Emisi GRK (%) tahunan

SASARAN STRATEGIS PEMDA
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DANMENINGKATNYA KAPABILITAS BIROKRASI
Indikator : Nilai SAKIP; Opini BPK; Manajemen Risiko Indeks; Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; Indeks Pelayanan Publik; Indeks SPBE; Indeks Integritas Daera

TUJUAN UTAMA OPD

TUJUAN UTAMA OPD
TERWUJUDNYA KELESTARIAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN
Indikator : Persentase tutupan lahan

SASARAN STRATEGIS OPD

SASARAN STRATEGIS OPD
MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH
Indikator : Laju pertumbuhan sektor kehutanan terhadap PDRB

SASARAN STRATEGIS OPD
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
Indikator : Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH) Mandiri

SASARAN STRATEGIS OPD
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN DAYA SAING USAHA PERHUTANAN SOSIAL MELALUI PENGUATAN KUPS
Indikator : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

SASARAN STRATEGIS OPD
MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEKTOR KEHUTANAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI HUTAN SECARA BERKELANJUTAN
Indikator : Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju *Net Zero Emisssion*; Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah; Indeks Keanekaragaman hayati

SASARAN STRATEGIS OPD
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI SEBAGAI EKOSISTEM PENYANGGA
Indikator : Persentase sempadan sungai yang tertutup vegetasi secara berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS OPD
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN ANTARA (OUTCOME)

SASARAN ANTARA (OUTCOME)
Meningkatnya produktivitas hasil hutan
Indikator : Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

SASARAN ANTARA (OUTCOME)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan
Indikator : Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)

SASARAN ANTARA (OUTCOME)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan
Indikator : Persentase Peningkatan Kelas Kelopok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

SASARAN ANTARA (OUTCOME)
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Indikator : Indeks Keanekaragaman Hayati

SASARAN ANTARA (OUTCOME)
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)
Indikator : Persentase Tutupan pada Lahan Kritis

SASARAN ANTARA (OUTCOME)
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP), penganggaran dan keuangan, kepegawaian dan BMD perangkat daerah
Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun, Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun, Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana, Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana

SASARAN ANTARA (OUTPUT)

SASARAN ANTARA (OUTPUT)
Nilai produksi dan produktivitas usaha kehutanan yang berkelanjutan
Indikator : Nilai produksi hasil hutan kayu dan non-kayu

SASARAN ANTARA (OUTPUT)
Kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap KTH
Indikator : Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi

SASARAN ANTARA (OUTPUT)
Kegiatan pembinaan, fasilitasi usaha dan akses pasar bagi KUPS
Indikator : Persentase KUPS yang difasilitasi peningkatan kelas

SASARAN ANTARA (OUTPUT)
Pelestarian dan pemulihan keanekaragaman hayati hutan
Indikator : Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

SASARAN ANTARA (OUTPUT)
Rehabilitasi dan perlindungan sempadan sungai
Indikator : Luas sempadan sungai yang yang direhabilitasi

SASARAN ANTARA (OUTPUT)
Pelayanan urusan kehutanan yang diberikan kepada stakeholder dalam 1 tahun
Indikator : Jumlah layanan urusan kehutanan yang diberikan kepada stakeholder dalam 1 tahun

PROGRAM

Program Pengelolaan Hutan
Indikator : Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Indikator : Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Indikator : Indeks Keanekaragaman Hayati

Program Pengelolaan Hutan
Indikator : Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Program Pengelolaan Hutan
Indikator : Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
Indikator : Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun, Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun, Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana, Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Kegiatan : Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
Indikator : Jumlah dokumen peyelesaian permasalahan kawasan hutan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)
Indikator : Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
Indikator : Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara

Kegiatan : Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Indikator : Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun

Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Indikator : Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Indikator : Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi

Kegiatan : Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
Indikator : Nilai produksi hasil hutan kayu
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
Indikator : Jumlah Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Indikator : Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi
Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Indikator : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
Indikator : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas
Sub Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial
Indikator : Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Indikator : Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan Kualitasnya

Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Indikator : Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Indikator : Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan
Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Indikator : Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola

Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Indikator : Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Indikator : Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Indikator : Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun
Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
Indikator : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan

Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator : Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi
Sub Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
Indikator : Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi

Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator : Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)
Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar KawasanHutan Negara
Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Indikator : Luas Lahan yang Dihijauakan di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Indikator : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Kegiatan : Perbenihan Tanaman Hutan
Indikator : Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi
Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Indikator : Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang beredar

Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Indikator : Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
Indikator : Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS
Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
Indikator : Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah dokumen peyelesaian permasalahan kawasan hutan
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah Hasil Walidata Sektoral

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator : Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Indikator : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Cross Cutting

UPT Kemenhut: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V; Badan Pertanahan Nasional; Bappeda; Dinas PUBMTR; Dinas LHP

UPT Kemenhut: Balai Perhutanan Sosial Palembang, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V; Dinas Perkebunan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata Dinas LHP

UPT Kemenhut: Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel; TNI; POLRI; Dinas LHP; BAPPEDA; Dinas Perkebunan

UPT Kemenhut: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Musi, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I; Balai Besar Sungai Wilayah Sumatera; Dinas LHP

BAPPEDA; BPKAD; BKD; BAPENDA; Inspektorat; Biro Organisasi; Biro Perekonomian; Biro Administrasi Pembangunan; Biro Hukum; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Palembang, September 2025
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEHUTANAN

Dr. ERKOMUDIN, SH., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196912081996031001